

**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)**

SKPD : Inspektorat
TAHUN ANGGARAN : 2026

PROGRAM		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN							
KODE PROGRAM		6.01.02							
KEGIATAN		Penyelenggaraan Pengawasan Internal							
SUB KEGIATAN		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah							
ANALISIS SITUASI		1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender). a. 1. Jumlah PD di Provinsi Kalimantan Timur 39 (1 Sekretariat Daerah, 1 Sekretariat DPRD, 1 Inspektorat, 20 Dinas & Badan dan 7 Biro) 2. Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah sebanyak 149 orang terdiri dari Laki-laki 84 orang (56%) dan Perempuan 65 Orang (44%). Dengan rincian PNS sebanyak 121 Orang dan P3K sebanyak 28 Orang - Pejabat Struktural dan Penyetaraan sebanyak 8 orang (L : 7 dan P : 1) Fungsional Pengawasan sebanyak 63 orang (*Auditor 81 orang = L : 42 orang dan P : 39 orang ; *P2UPD 24 Orang = L : 14 Orang dan P : 10 Orang) - Fungsional Umum sebanyak 10 orang (L : 6 Orang dan P : 4 orang) - P3K sebanyak 28 orang (L ; 17 orang dan P : 11 orang) 2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan : 1) Akses : Masih rendahnya jumlah perangkat daerah yang menganggarkan Anggaran Responsif Gender di Provinsi Kalimantan Timur disebabkan karena keterbatasan kemampuan SDM pada perangkat daerah tersebut tentang Gender Partisipasi : 1. Belum adanya pelatihan dan pendampingan penyusunan PPRG secara intensif dan optimal 2. Masih rendahnya komitmen dari perangkat daerah untuk melakukan pengintegrasian gender dalam perencanaannya Kontrol : 1. Belum adanya tools/juklak/juknis yang dapat digunakan sebagai pedoman/panduan untuk melakukan pengawasan/evaluasi berbasis prinsip 3 E berkaitan dengan PPRG 2. Belum optimalnya peran Pokja PUG Provinsi Kalimantan Timur Manfaat : Pengawasan/Evaluasi belum mampu mendorong perangkat daerah menyusun perencanaan PPRG berdasarkan prinsip 3E b. Penyebab Internal : 1) 1. Kurangnya pemahaman Fungsional Pengawasan tentang bagaimana melakukan pengawasan/evaluasi terhadap integrasi gender dalam perencanaan perangkat daerah 2. Regulasi sebagai dasar penyusunan PPRG pada Perangkat Daerah sudah ada, namun belum dilaksanakan secara optimal 3. Pengawasan/evaluasi PPRG sudah dilakukan, namun belum pengawasan/evaluasi yang dilakukan belum mengacu pada pengawasan/evaluasi PPRG berdasarkan prinsip 3 E c. Penyebab Eksternal : 1) 1. Belum optimalnya pendampingan dalam penyusunan PPRG pada setiap Perangkat Daerah 2. Belum optimalnyafungsi Pokja PUG pada lembaga driver PUG maupun pada perangkat daerah teknis							
CAPAIAN PROGRAM		1. Tolak Ukur Tujuan : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintah Daerah a. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintah Daerah a.Menurunkan jumlah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang tidak mengintegrasikan gender dalam perencanaan pembangunan daerah 2. Indikator dan Target Kinerja a. Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah							
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM		Rp. 315.859.734							
RENCANA AKSI		Kegiatan 1 <table><tr><td>Masukan</td><td>Rp. 315,859,734</td></tr><tr><td>Keluaran</td><td>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah sebanyak 15 Laporan</td></tr><tr><td>Hasil</td><td>1. Persentase Laporan Keuangan Pemda dan Perangkat Daerah yang sesuai SAP sebesar 100% 2. Persentase Identifikasi Manajemen Resiko pada Perangkat Daerah sebesar 100% 3. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Hasil Pemeriksaan APIP sebesar 85%</td></tr></table>	Masukan	Rp. 315,859,734	Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah sebanyak 15 Laporan	Hasil	1. Persentase Laporan Keuangan Pemda dan Perangkat Daerah yang sesuai SAP sebesar 100% 2. Persentase Identifikasi Manajemen Resiko pada Perangkat Daerah sebesar 100% 3. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Hasil Pemeriksaan APIP sebesar 85%	Penyusunan Tools/ Juknis/ Juklak Pengawasan/ Evaluasi PPRG berdasarkan prinsip 3 E 2. Sosialisasi pengawasan /evaluasi PPRG berdasarkan prinsip 3E pada Perangkat Daerah 3. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah sebagai Driver PUG (Bappeda dan DKP3A Prov. Kaltim) untuk me mberikan pendampingan penyusunan PPRG pada perangkat daerah 4. Mengusulkan / Menegaskan penyusunan PPRG pada perangkat daerah dengan menggunakan surat Gubernur Kalimantan Timur pada pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah
Masukan	Rp. 315,859,734								
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah sebanyak 15 Laporan								
Hasil	1. Persentase Laporan Keuangan Pemda dan Perangkat Daerah yang sesuai SAP sebesar 100% 2. Persentase Identifikasi Manajemen Resiko pada Perangkat Daerah sebesar 100% 3. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Hasil Pemeriksaan APIP sebesar 85%								

Samarinda, 10 Juli 2025

Inspektur



Dr. H. M. Irfan Prananta, SE, MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197408181997031006